

ABSTRAK

Analisis Pencegahan Penularan Penyakit Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah.

Oleh :Moh. Anwar

Dosen Pembimbing Utama :Hidayat Andyanto, S.H., M.Si.

Dosen Pembimbing Pendamping : Moh. Zainol Arief, S.H., M.H

Transfusi darah telah dilakukan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) sejak tahun 1950, guna membantu rumah sakit militer dan sipil setelah diserahkan oleh tentara Belanda dan pemerintah sipilnya . Sebelumnya, transfusi darah dilakukan oleh NERKAI (Nederlandse Rode Kruis Afdeling Indonesie = Palang Merah Indonesia) yang dimulai pada tahun 1945. Intinya, upaya transfusi darah merupakan salah satu bagian terpenting dari tugas Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, dan juga sebagai bentuk bantuan. sesama manusia. Selain dari aspek pelayanan kesehatan juga terkait dengan aspek sosial, organisasi, kesalingtergantungan nasional yang luas serta aspek internasional, dan dalam kerangka kerjasama antar Pemerintah dan antar Perhimpunan Palang Merah Nasional.

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ialah Apa unsur dalam pasal 11 ayat (3) pada uji saring sudah memenuhi standar untuk mengantisipasi penularan penyakit, Apa akibat hukum terhadap UTD PMI daerah jika proses uji saring menimbulkan penularan penyakit Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini ialah untuk mendapatkan solusi dari rumusan masalah tersebut.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau hukum positif dengan beberapa sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta penelusuran bahan hukum melalui perundang-undangan dan literatur lainnya.

Perubahan kebijakan Pemerintah dari sentralisasi kepada desentralisasi yang telah menempatkan masalah kesehatan sebagai urusan wajib pemerintah daerah, perlu diimplementasikan secara nyata tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah. Pengelolaan pelayanan darah sebagai bagian yang esensial dan integral dari upaya kesehatan secara nasional haruslah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap mengacu pada kepentingan masyarakat luas. Akibat Hukum Terhadap UTD PMI Daerah Jika Proses Uji Saring Menimbulkan Penularan Penyakit dapat di jerat perlindungan konsumen, perdata dan pidana.

Kata Kunci : Transfusi darah, penularan penyakit, Perlindungan hukum.

ABSTRACT

Analysis of Article 11 of Government Regulation Number 7 of 2011 concerning Blood Services in Preventing Disease Transmission.

By: Moh. Anwar

Main Advisor: Hidayat Andyanto, S.H., M.Si.

Supervising Lecturer: Moh. Zainol Arief, S.H., M.H

Blood transfusions have been carried out by the Indonesian Red Cross (PMI) since 1950, to assist military and civilian hospitals after being handed over by the Dutch army and the civilian government. Previously, blood transfusions were carried out by NERKAI (Nederlandse Rode Kruis Afdeling Indonesie = Indonesian Red Cross) which began in 1945. In essence, blood transfusion efforts are one of the most important parts of the Government's task in the field of public health services, and also as a form of assistance. fellow human beings. Apart from the aspect of health services, it is also related to social aspects, organization, broad national interdependence and international aspects, and within the framework of cooperation between Governments and between National Red Cross Associations.

The formulation of the problem in writing this thesis is What are the elements in article 11 paragraph (3) in the screening test that meet the standards for anticipating disease transmission, What are the legal consequences for the regional PMI UTD if the screening process causes disease transmission The purpose of writing this thesis is to get a solution from the formulation of the problem.

The research method in writing this thesis is normative by using a statutory or positive law approach with several primary and secondary sources of legal material, as well as tracing legal materials through legislation and other literature.

Changes in Government policy from centralization to decentralization which have placed health issues as a mandatory business for local governments, need to be implemented in real terms without reducing the responsibility of the Government. Management of blood services as an essential and integral part of national health efforts must be a shared responsibility between the Government and local governments while still referring to the interests of the wider community. Legal Consequences on Regional PMI UTD If the Screening Test Process Leads to Disease Transmission, consumer protection, civil and criminal protection canbeensnared.

Keywords : Blood transfusion, disease transmission, Legal protection.